



# Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Banjar Jaya

Humala Simangunsong, Yuda Perwira, Wira Apriani

Teknik Informatika  
STMIK Pelita Nusantara, Jl. Iskandar Muda No 1. Medan, Sumatera Utara,  
Indoensia

Email: humala45@gmail.com

## Abstrak

*Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat akan sukses atau dapat terjadi apabila warga ikut berpartisipasi. Dalam kerangka acuan pembangunan nasional umumnya dan khususnya Kab. Pasuruan, memberdayakan masyarakat diberbagai segi sudah seharusnya menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab bersama. Membangun ekonomi masyarakat pedesaan bearti pula membangun sebagian besar penduduk indonesia. Selain memiliki potensi sumber daya manusia pedesaan juga memiliki potensi sumber daya alam. Kabupaten Pasuruan khususnya Desa Banjar JayaKec. PD. Tualang memiliki potensi besar untuk mampu menjadi desa mandiri. Dari sisi masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang dengan dukungan kuat dari aparat desa. Oleh karena itu bersamaan dengan kegiatan KKN STMIK Pelita Nusantara bersama mahasiswa yang bertepatan di Desa Banjar Jaya berinisiatif mengadakan penyuluhan tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri bagi warga desa. Penyuluhan ini diselenggarakan dengan tujuan membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk megurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.*

**Kata kunci:** *Ekonomi Masyarakat, Desa Mandiri*

## 1. Pendahuluan

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat akan sukses atau dapat terjadi apabila warga ikut berpartisipasi.

Dalam kerangka acuan pembangunan nasional umumnya dan khususnya Kab. Pasuruan, memberdayakan masyarakat diberbagai segi sudah seharusnya menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab bersama. Membangun ekonomi masyarakat pedesaan bearti pula membangun sebagian besar penduduk indonesia. Selain memiliki potensi sumber daya manusia pedesaan juga memiliki potensi sumber daya alam.

Kabupaten Langkat khususnya Desa Banjar Jaya Kec. PD. Tualang memiliki potensi besar untuk mampu menjadi desa mandiri. Dari sisi masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang dengan dukungan kuat dari aparat desa. Oleh karena itu bersamaan dengan kegiatan KKN STMIK Pelita Nusantara bersama mahasiswa yang bertepatan di Desa Banjar Jaya berinisiatif mengadakan penyuluhan tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri bagi warga desa.

Penyuluhan ini diselenggarakan dengan tujuan membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk megurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki.





Mengacu pada uraian analisis situasi persoalan prioritas pada Desa Desa Banjar Jaya Kec. PD Tualang Kab. Langkat maka dilakukan penyuluhan tentang pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri. Hal ini dilakukan sebab kurangnya rasa kepercayaan diri warga dan aparat desa dalam bertindak.

### 1.1. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Memberi pemahan tentang konsep menuju desa mandiri
- Memberi pemahan lewat penyuluhan yang dilaksanakan mengenai konsep ekonomi masuaraat mandiri
- Memberi pemahan lwat pendampingan tentang pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya alam yang ada.

### 1.2. Manfaat Kegiatan

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang ditawarkan adalah melakukan penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat mewujudkan desa mandiri. Oleh karena itu, materi penyuluhan meliputi dua hal berikut ini.

- Konsep tentang Pemberdayaan Masyarakat
- Konsep tentang Ekonomi Masyarakat Mandiri
- Langkah-langkah dalam menuju Desa Mandiri

Desain materi penyuluhan di atas diharapkan dapat meningkatkan beberapa kemampuan guru, diantaranya sebagai berikut ini:

- Mampu memahami Konsep tentang Pemberdayaan Masyarakat
- Mampu memahami Konsep tentang Ekonomi Masyarakat Mandiri
- Dapat menuju Desa Mandiri

### 1.3. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan warga dan para pamong desa menuju Desa Mandiri

## 2. Realisasi Kegiatan

### 2.1. Bentuk Kegiatan, Jadwal Dan Tempat Kegiatan

#### a. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama penyuluhan dan dilanjutkan dengan terjun langsung pada warga sekitar guna meningkatkan kemampuan warga. Pada tahap pertama dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Seluruh peserta dapat mengajuakn berbagai unek-unek mereka dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada tahap kedua penyuluh terjun langsung ke warga meninjau keseharian warga serta memberikan pengarahan yang tepat guna menuju desa mandiri dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Warga beserta para pimpinan desa dapat mengimplementasikan secara langsung hasil penyuluhan.

#### b. Jadwal

Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat pada bulan Juni hingga Juli 2018 seperti berikut ini

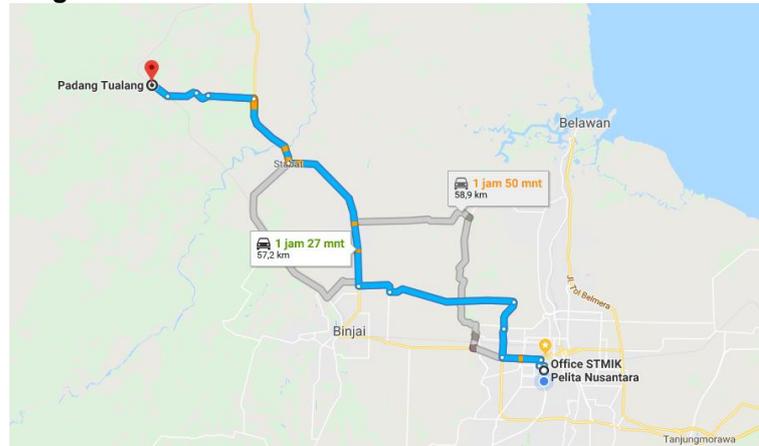
Tabel 1. Jadwal

No	Nama Kegiatan	(Juni-Juli) Minggu Ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan dan penggandaan materi						
2	Penentuan jadwal penyuluhan dan koordinasi						
3	Penggandaan sertifikat						
4	Pelaksanaan pelatihan						
5	Evaluasi dan penyusunan laporan						





### c. Tempat Kegiatan



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian

## 2.2. Garis-Garis Besar Materi

- Pengenalan Pengertian Pemberdayaan, Masyarakat dan Pembangunan.
- Partisipasi dan Ruang Lingkup Masyarakat
- Konsep, Tujuan dan Teori Pembangunan
- Pemberdayaan Masyarakat; Konsep Dasar
- Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan.
- Latar Belakang Pemberdayaan Masyarakat, Proses dan Tahapan Pemberdayaan
- Perkembangan Pemberdayaan di Indonesia
- Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
- Implementasi, Teori dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
- Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan
- Diskusi
- Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat

## 2.3. Masyarakat Sasaran

Masyarakat desa Banjar Jaya khususnya penggiat UMKM sebanyak 28 Warga.

## 3. Tinjauan Hasil Yang Dicapai

Penyuluhan tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Desa Mandiri dihadiri oleh hampir 75% dari total warga desa Banjar Jaya Kec. Kab. Langkat. Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Pemahaman dan penerapan secara langsung yang disesuaikan dengan kondisi lapangan merupakan hasil dari penyuluhan yang diberikan.

Kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan selama sehari, mendapat sambutan yang baik dari peserta. Keadaan ini dapat dilihat dari kehadiran peserta yang cukup memenuhi balai desa. Didukung juga mahasiswa STMIK Pelita Nusantara Medan yang sedang KKN di Desa tersebut. Demikian laporan pengabdian ini disusun untuk menjadi bahan pijakan dalam meningkatkan potensi warga desa untuk mewujudkan desa mandiri. Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, maka melalui kesempatan ini, Pengabdian mengharap masukan demi perbaikan yang akan datang.

## 4. Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsami. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Rineka Cipta: Jakarta.





- Coastal Community Development Project (CCDP). 2015. Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir. Jakarta: CCDP
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington : Congressional Quarterly Inc.
- Eko Sutoro. 2015. Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Indianhano, Dwiyanto. 2009. Kebijakan publik berbasis Dynamic Policy Analisis. Gaya Media : Yogyakarta
- Kaho, Yosef Riwu, 1995, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat .Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Yogyakarta: UGM.
- Kartasasmita, Ginanjar.2004. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka CIDESINDO
- Mulligan, David. 2006. Rehabilitas Tambang. Australia : Commonwealth Copyright Administration. Ndraha, Taliziduhu 1982, Pembangunan Desa (Makalah Informatif Disajikan dalam rangka Temu Ilmiah Pembangunan Desa 16-17 Juni 1982), Jakarta Dit.
- Bangdes – IIP. Nugroho, Ryan. 2003. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Jakarta. Penerbit : PT. Elex Media Komputindo
- Parson, Wayne. 2006. Pengantar teori dan Praktek Analisis Kebijakan (terjemahan). Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Poloma. Margaret M. 1992. Sosiologi Kontemporer (terjemahan). Jakarta, CV. Rajawali.
- Putra, Padila. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sugiyono, 2001. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta : Bandung. Winarno, B. 2004. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindoimple : Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 1985. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Gunung Agung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. Program Inpres Desa Tertinggal Kebijakan dan Arah Baru Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Bappenas. Suparno, A.Suhaenah. 2001. Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
- Tjenreng Baharuddin, 1988, Upaya Pemerintahan Kelurahan Meningkatkan Partisipasi Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Organisasi LKMD di Kotamadya Dati II Bandung, Tesis untuk Magister Sains Program Pendidikan Magister Fakultas Pasca Sarjana UNPAD Bandung.
- Thoha Miftah, 1993, Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Interferensi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

